



PERMASALAHAN PETANI SWADAYA DAN POLEMIC HARGA TANDAN BUAH SEGAR (Studi Kasus di Propinsi Jambi)

Hasrul Abdi Hasibuan, Sri Wening, Eka Listia, dan Muhammad Akmal Agustira

ABSTRAK

Saat ini, luas areal lahan perkebunan kelapa sawit rakyat/petani menempati peringkat pertama yang mayoritas dikelola secara swadaya. Petani swadaya minim memperoleh bimbingan dan arahan dalam pengelolaan perkebunan sehingga menyebabkan produktivitas dan harga tandan buah segar (TBS) jauh dari harapan. Permasalahan petani dan polemik harga TBS khususnya swadaya perlu dikaji untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh petani dengan studi kasus di Propinsi Jambi. Hasil kajian menunjukkan bahwa permasalahan umum yang dihadapi oleh petani di Propinsi Jambi adalah kondisi ekonomi yang lemah, tidak mengetahui informasi benih unggul, kultur teknis dan panen tidak standar serta rendah dan tidak pastinya harga TBS. Pada Oktober 2015, harga TBS petani swadaya berkisar antara Rp. 850-970 sedangkan Maret 2016 sebesar Rp. 1700-1850. Rendahnya harga TBS disebabkan oleh tidak adanya kemitraan yang kuat antara petani swadaya dengan perusahaan, selain itu TBS yang dikirim ke pabrik kelapa sawit belum memenuhi standar dari segi varietas dan kematangannya. Peningkatan harga pada kuartal pertama 2016 disebabkan oleh produk buah sedikit akibat dari *El Nino* pada 2015, selain itu harga CPO tinggi. Harga TBS petani swadaya pada Maret 2016 lebih tinggi dibandingkan petani plasma. Namun demikian peningkatan harga ini perlu diantisipasi melalui peningkatan kualitas dan melakukan kemitraan yang kuat dengan perusahaan.

Kata kunci: petani swadaya, harga, tandan buah segar, permasalahan petani, kemitraan

Penulis yang tidak disertai dengan catatan kaki instansi adalah peneliti pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit

Hasrul Abdi Hasibuan (✉)
Pusat Penelitian Kelapa Sawit
Jl. Brigjen Katamsa No. 51 Medan, Indonesia
Email: : hasibuan_abdi@yahoo.com

PENDAHULUAN

Pengembangan perkebunan kelapa sawit oleh rakyat/petani sangat tinggi seiring dengan prospek minyak sawit yang semakin menjanjikan. Sayangnya, pola pengembangan yang disertai dengan kemitraan sangat minim sehingga petani membangun kelapa sawitnya secara swadaya. Petani swadaya kurang memperoleh bimbingan dan arahan terkait dengan penggunaan benih unggul, kultur teknis, modal dan kelembagaan sehingga menyebabkan produktivitas kelapa sawitnya rendah (Rivai dalam Agustira *et al.*, 2012a).

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT. 140/2/2007 telah mengatur kewajiban perusahaan untuk melaksanakan pola kemitraan dengan membangun kebun masyarakat paling sedikit seluas 20% dari luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan (Agustira *et al.*, 2012a). Pengembangan perkebunan sawit rakyat bersama dengan perusahaan dapat dikelola melalui sistem pengelolaan kebun satu manajemen (Agustira *et al.*, 2012b). Namun demikian, permasalahan antara petani dan perusahaan yang bermitra juga sering terjadi diantaranya adalah perusahaan kurang melakukan pembinaan baik kultur teknis maupun manajemen usaha tani, petani tidak sepenuhnya menjual buah sawit ke perusahaan mitra, pemeliharaan kebun inti dan mitra yang berbeda-beda dan konflik sosial lainnya (Amalia *et al.*, 2015).

Harga tandan buah segar (TBS) juga merupakan salah satu faktor utama yang menimbulkan permasalahan antara petani dan perusahaan. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Permentan No. 17/Permentan/OT. 140/2/2010 telah menetapkan kebijakan pemasaran hasil produksi petani untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara

pabrik kelapa sawit (PKS) (Wahyono *et al.*, 2013). Namun demikian, harga TBS dari petani swadaya belum diatur dan beberapa perusahaan menggunakan mekanisme pasar sehingga nilainya disesuaikan dengan persaingan pasar yang ada. Hal ini menyebabkan harga TBS petani swadaya relatif lebih rendah dibandingkan petani yang bermitra namun pada kondisi tertentu harganya dapat lebih tinggi.

Syahza (2004) melaporkan bahwa petani mendapatkan harga lebih rendah dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Rifai *et al.* (2008) dan Nasution *et al.* (2014) juga menyatakan bahwa petani swadaya cenderung menerima harga TBS lebih rendah dibandingkan TBS yang dibayarkan PKS dikarenakan oleh panjangnya saluran pemasaran. Saluran pemasaran yang ada saat ini ada 4 jenis meliputi saluran 1 (petani-agen buah-ramp-PKS), saluran 2 (petani-agen buah-PKS), saluran 3 (petani-ramp-PKS) dan saluran 4 (petani-PKS) (Nasution *et al.*, 2014). IFC (2013) melaporkan bahwa petani swadaya yang menjual TBS langsung ke PKS menerima harga 16% lebih tinggi dibandingkan dengan menjual ke pedagang perantara dan 5% lebih tinggi dibandingkan dengan menjual ke koperasi. Selain itu, Nasution *et al.* (2015) menambahkan bahwa pendapatan diantara rumah tangga petani swadaya secara umum bervariasi tergantung dari lokasi tinggal petani tersebut.

Propinsi Jambi merupakan salah satu daerah pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat yang terletak di 9 kabupaten di antaranya adalah Muara Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Tebo, Bungo, Merangin dan Sarolangun serta sebagian kecil Kerinci. Beberapa petani di daerah tersebut mengikuti pola kemitraan dan yang lainnya secara swadaya. Sebagian besar petani yang bermitra masih bekerjasama dengan perusahaan dan sebagian lain tidak bekerjasama lagi. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan yang timbul antara petani dan perusahaan. Oleh karena itu, kajian terkait petani perlu dilakukan untuk mengetahui permasalahan petani melalui survei dan diskusi dengan beberapa petani di Propinsi Jambi.

METODOLOGI

Survei dilakukan pada 4 Kabupaten di Propinsi Jambi yaitu Kabupaten Tebo, Bungo, Merangin dan Sarolangun. Waktu penelitian dilaksanakan pada 2 waktu berbeda yaitu Oktober 2015 dan Maret 2016. Penelitian ini bersifat deksriptif dengan data yang diperoleh menggunakan metode dalam pengambilan sampel secara observasi dan wawancara dengan petani, agen buah, pemilik *ramp*, perusahaan pabrik kelapa sawit, serta asosiasi petani kelapa sawit di Propinsi Jambi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Petani dan Permasalahannya

Petani Swadaya di Jambi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelas yaitu:

- Petani yang belum mengetahui informasi tentang bibit unggul dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang standar (petani awam).
- Petani yang sudah mengetahui informasi tentang bibit unggul namun pengelolaan perkebunan belum standar.
- Petani yang telah menggunakan bibit unggul dan kebun telah dikelola sesuai standar (petani sukses).

Permasalahan umum yang dihadapi oleh petani di Jambi antara lain:

- Kondisi ekonomi yang lemah
- Tidak tahu bibit unggul dan cara memperolehnya
- Tidak tahu cara pembibitan dan penanaman yang standar
- Tidak tahu cara perawatan sesuai dengan kultur teknis yang standar
- Tidak tahu cara pemupukan dan cara memperoleh pupuk yang standar
- Tidak tahu cara panen yang standar
- Rendah dan tidak pastinya harga TBS

Permasalahan tersebut di atas umumnya terjadi pada petani swadaya sedangkan petani plasma tidak merasakan dikarenakan adanya bimbingan dan arahan dari perusahaan mitranya. Meskipun demikian, petani plasma yang memiliki lahan perkebunan kelapa



sawit lain yang dikelola secara swadaya juga tidak menggunakan benih unggul disebabkan oleh tidak tahu cara memperolehnya.

Di Jambi belum ada kemitraan yang kuat antara petani swadaya dengan perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) (seperti kemitraan petani plasma dengan perusahaan), di samping itu pula, ada PKS yang berdiri tanpa kebun. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT. 140/2/2007, perusahaan harus melaksanakan pola kemitraan dengan membangun kebun masyarakat paling sedikit seluas 20% dari luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan (Agustira *et al.*, 2012a). Adanya Permentan tersebut memberikan peluang kerjasama antara petani dengan PKS tanpa kebun. Dari hasil survei diperoleh bahwa awalnya PKS tanpa kebun bermitra dengan petani swadaya disekitarnya dengan bentuk kerjasama yang tidak kuat. Salah satu kelemahan kerjasama tersebut adalah tidak diaturnya pemasaran TBS petani swadaya yang bermitra. Hal ini tampak pada penetapan harga TBS petani oleh PKS tanpa kebun tidak mengikuti harga sesuai rapat TBS yang biasa dilakukan di Dinas Perkebunan Propinsi Jambi setiap minggunya. Akibat dari lemahnya atau tidak adanya kemitraan antara petani dan pihak PKS timbul agen-agen pembeli TBS petani. Hal ini menyebabkan harga di tingkat petani menjadi lebih rendah.

Di samping itu juga, kemitraan petani plasma di Jambi ada yang mengalami perpecahan yaitu tidak lagi bermitra dengan perusahaan inti/induknya dan mengelolanya secara swadaya. Salah satu penyebab perpecahan ini adalah harga TBS rendah ketika Tabel Rendemen pada Permentan belum di revisi. Harga TBS petani bermitra juga dibedakan berdasarkan umur tanamannya (harga TBS dari tanaman muda lebih rendah dibandingkan tanaman tua dan dewasa), sementara TBS petani swadaya disamaratakan. Selain itu, adanya PKS tanpa kebun juga turut memicu terjadinya perpecahan kemitraan antara petani dan perusahaan dikarenakan pada awalnya harga TBS yang diberikan lebih tinggi daripada PKS disekitarnya agar memperoleh pasokan buah. Hal ini yang menyebabkan TBS petani yang bermitra dengan perusahaan lain berpindah ke PKS tanpa kebun.

Perpecahan kemitraan ini merugikan petani dikarenakan tidak adanya kepastian harga TBS swadaya karena sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Kendala lain yang dihadapi oleh petani adalah

beberapa lahannya memasuki masa replanting dan akan membutuhkan modal yang cukup besar. Beberapa petani ingin kembali bermitra dengan perusahaan dan sebagian lagi ingin mengelolanya sendiri. Namun demikian, perusahaan inti memiliki standar dalam program replanting yang berhubungan dengan luasan lahan dan arealnya yang tidak terpisah (*spot*).

Polemik Harga Tandan Buah Segar (TBS) Petani

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa saluran pemasaran TBS petani swadaya hingga ke PKS mempengaruhi harga di tingkat petani. Nasution *et al.* (2014) melaporkan bahwa saluran pemasaran TBS di Kabupaten Aceh Selatan, Nangroe Aceh Darussalam ada 4 jenis yaitu saluran 1 (petani - agen buah - ramp - PKS), saluran 2 (petani - agen buah - PKS), saluran 3 (petani - ramp - PKS) dan saluran 4 (petani - PKS). Hal yang sama juga ditemui di Jambi dalam saluran pemasaran TBS petani.

Survei pada Oktober 2015 diperoleh bahwa harga di beberapa PKS untuk buah swadaya berkisar antara Rp. 850-970/kg (Tabel 1). Petani memperoleh harga dari agen sebesar Rp. 710-800/kg dan harus mengeluarkan upah tenaga pemanen sebesar Rp. 140-150/kg. Dari data tersebut diperoleh bahwa petani swadaya menjual TBS ke agen lebih rendah 18% dari harga yang diperoleh apabila dijual langsung ke PKS. Nilai ini sedikit lebih tinggi dibandingkan yang telah dilaporkan oleh IFC (2013) bahwa petani swadaya yang menjual TBS ke pedagang perantara menerima harga 16% lebih rendah dibandingkan dijual langsung ke PKS.

Agen memperoleh pendapatan sebesar Rp. 170-180/kg dengan rincian biaya yang harus dikeluarkan yaitu biaya transportasi Rp. 70-80/kg, nimbang + muat Rp. 40-50/kg, *fee* kepada pemilik DO Rp. 5-10/kg, dan bongkar di PKS Rp. 10-15/kg. Dari biaya yang dikeluarkan tersebut, agen mendapat keuntungan sebesar Rp. 30-40/kg. Sementara itu ramp memperoleh pendapatan sebesar Rp. 50-70/kg. Ditinjau dari pendapatan per bulan, pemanen memperoleh pendapatan sebesar Rp. 1.000.000-1.500.000, petani sebesar Rp. 2.500.000-3.500.000 / 2 ha (sangat tergantung dari produktivitas TBS per ha), agen buah sebesar Rp. 4.000.000-5.000.000 dan pemilik *ramp* sebesar Rp. 8.000.000-10.000.000.

Tabel 1. Perbandingan harga TBS petani swadaya dan bermitra pada periode Oktober 2015 dan Maret 2016 di beberapa PKS di Propinsi Jambi

Petani	Harga TBS/kg	
	Oktober 2015	Maret 2016
Bermitra/Plasma (pada umur tanaman 10 tahun)*	Rp. 1.296,33-1.405,91	Rp. 1.583,46-1.755,35
Swadaya**	Rp. 850-970	Rp. 1.700-1.850

Keterangan: * diperoleh dari Dinas Perkebunan Propinsi Jambi, 2015 & 2016

** diperoleh dari hasil survei di tingkat petani, agen dan PKS

Tabel 1 menunjukkan adanya disvarietas harga TBS petani swadaya dan petani yang bermitra. Harga TBS petani swadaya pada Oktober 2015 lebih rendah dibandingkan petani bermitra. Perbedaan ini terjadi karena harga TBS petani swadaya belum diatur dalam kesepakatan bersama antara pemerintah, perusahaan dan petani. Pada Maret 2016, harga TBS petani swadaya relatif lebih tinggi dibandingkan harga TBS petani bermitra. Hal ini terjadi disebabkan oleh produktivitas buah pada kuartal pertama 2016 rendah/sedikit yang diakibatkan oleh *El Nino* pada 2015

El Nino menyebabkan tanaman kelapa sawit mengalami *water* defisit yang berdampak pada

perkembangan vegetatif, proses pembungaan dan pematangan buah terganggu sehingga produktivitas menurun. Siregar (2015) menambahkan bahwa *El Nino* 2015 juga menyebabkan penurunan produksi CPO dan diperkirakan tahun 2016-2017 menurun sebesar 15-20%. Selain itu, pada 2015 juga terjadi kebakaran yang menimbulkan asap dan menyebabkan serangga penyerbuk kelapa sawit tidak aktif bekerja untuk membantu proses pembuahan bunga betina. Menurut Prasetyo dan Susanto (2015) bahwa dampak asap menyebabkan kunjungan serangga penyerbuk kelapa sawit sedikit yang dapat mengakibatkan penurunan tingkat transfer polen menurun sehingga penyerbukan bungan tidak optimal.

Tabel 2. Harga TBS petani plasma pada Maret 2016 di beberapa PKS di Propinsi Jambi

Umur tanaman	Harga TBS/kg (Rp)	
	Petani plasma*	Harga Petani swadaya**
3 Tahun	1237,43-1368,19	
4 Tahun	1320,17-1463,18	
5 Tahun	1381,00-1530,32	
6 Tahun	1438,76-1594,12	
7 Tahun	1475,08-1634,32	
8 Tahun	1506,35-1669,28	1700-1850
9 Tahun	1536,07-1702,01	
10 - 20 Tahun	1583,46-1755,35	
21 - 24 Tahun	1535,83-1703,13	
25 Tahun	1465,38-1626,08	

Keterangan: * diperoleh dari Dinas Perkebunan Propinsi Jambi, 2016

** diperoleh dari hasil survei di tingkat petani, agen dan PKS

Tingginya harga TBS pada Maret 2016 juga disebabkan oleh harga CPO dan kernel yang tinggi masing-masing sebesar Rp. 6.925,31-7.561,92 dan Rp. 5.315,91-6.303,25 dibandingkan pada Oktober 2015 yaitu Rp. 5.816,95-6.446,80 dan Rp. 3.963,07-4.342,96 (Dinas Perkebunan Propinsi Jambi, 2015 dan 2016). Kenaikan harga CPO ini juga telah diprediksi oleh Kurniawan (2015) bahwa harga CPO dunia di tahun 2016 diproyeksikan naik sekitar 9,9% dari tahun 2015.

Disvarietas harga menyebabkan perpindahan buah dari swadaya ke plasma atau sebaliknya pada saat harga yang tidak saling menguntungkan. Terlebih lagi, pada kondisi bulan Maret 2016 menimbulkan kesenjangan bagi petani plasma karena harga TBS plasma rendah dan dibedakan pula berdasarkan umur tanaman dimana harga TBS pada umur muda dan tua jauh dari harga untuk petani swadaya (Tabel 2). Hal ini berdampak pada penerimaan buah di PKS. Pada kuartal pertama di tahun 2016, PKS yang memberikan harga TBS rendah mengalami penurunan penerimaan buah sedangkan PKS dengan harga tinggi penerimaan buahnya meningkat pesat (umumnya PKS tanpa kebun) (Gambar 1)

Kondisi ini, perlu diantisipasi karena harga tinggi tidak selamanya berpihak pada petani swadaya seperti pada kondisi bulan Oktober 2015 (Tabel 1) dan bulan atau tahun sebelumnya. Sementara harga TBS petani plasma relatif baik dan pasti karena telah diatur



Gambar 1. Kondisi buah yang diterima oleh PKS A relatif sedikit (kiri) dan PKS B tanpa kebun relatif lebih banyak menerima buah (kanan) pada Maret 2016

dalam Permentan No. 17/Permentan/OT. 140/2/2010 yang disusun untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antar PKS (Wahyono *et al.*, 2013).

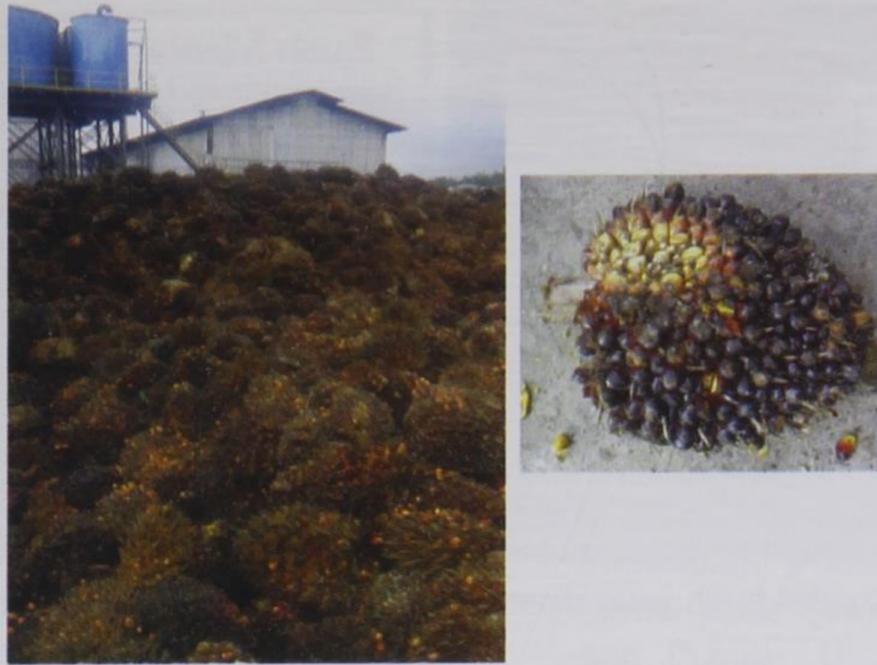
Faktor yang Mempengaruhi Harga TBS Di Tingkat Petani

Harga TBS dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu harga CPO, indeks K dan rendemen CPO dan kernel yang dikandung TBS. Faktor harga CPO memiliki peran besar dalam penetapan harga TBS petani. Apalagi, Indonesia menerapkan bea keluar untuk CPO yang diekspor. Menurut Agustira dan Nurkhoiry (2011) bahwa dampak penerapan bea keluar terhadap CPO menekan harga TBS di tingkat petani sebesar 0,64-0,66% sehingga penerapan bea keluar CPO hingga 25% dapat menekan harga TBS ditingkat petani sebesar 20-21%.

Di tingkat petani faktor yang mempengaruhi harga adalah tinggi atau rendahnya rendemen CPO dan kernel TBS. Menurut Hasibuan dan Nuryanto (2015) bahwa rendemen CPO dan kernel sangat dipengaruhi oleh varietas tanaman, umur tanaman, kultur teknis, serangga penyerbuk kelapa sawit, iklim dan lingkungan, tingkat kematangan dan cara pemanenan, pengangkutan dan pengolahan TBS di pabrik.

Dari hasil survei diperoleh bahwa varietas buah petani swadaya yang dikirim ke beberapa PKS adalah Dura dan Tenera dengan porsi masing-masing sebesar 30-40% dan 60-70%. Hal ini terjadi dikarenakan sebagian petani menggunakan bibit dari sumber yang tidak jelas dan sebagian lagi mengambil bibit cabutan dari perkebunan besar. Di tinjau dari tingkat kematangannya TBS yang dikirim petani ke PKS adalah 50-70% mengkal, 10-40% matang, 10-20% mentah dan 5-10% lewat matang seperti yang disajikan pada Gambar 2. Namun demikian, proporsi ini dapat berbeda apabila yang melihat adalah petani, agen dan pihak PKS.

Standar kematangan buah dari petani yang diterima oleh beberapa PKS di Jambi tidak lagi berdasarkan jumlah buah yang terberondol dan warna buah melainkan warna mesokarp yaitu orange (matang), kuning (mengkal) dan putih atau kuning pucat (mentah). Tentunya, kriteria kematangan buah berdasarkan warna sedikit bias dan relatif berbeda pada setiap orang yang melihatnya. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 bahwa kondisi warna buah luar masih hitam dan belum ada yang memberondol



Gambar 2. Kondisi kematangan buah yang diterima PKS pada Maret 2016

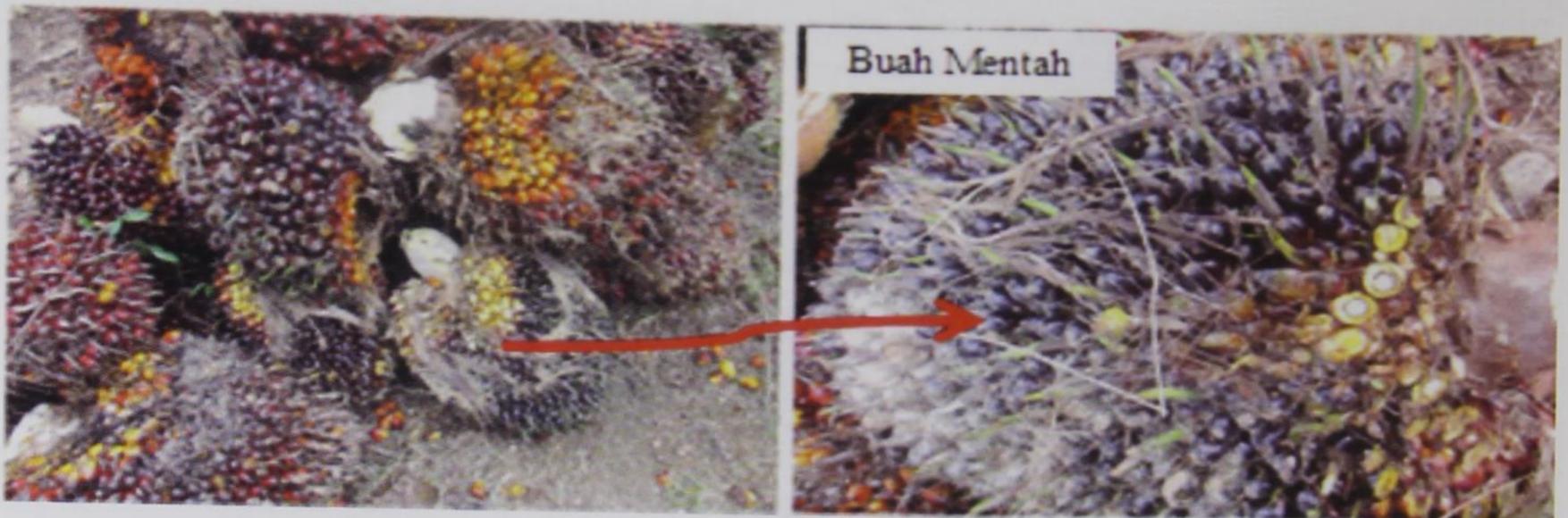


Gambar 3. Kriteria kematangan buah berdasarkan warna buah luar dan mesokarp

namun berondolan dibelah dan atau dipukul menunjukkan warna kuning (kriteria matang) padahal sesuai standarnya masih dikategorikan mentah. Gambar 2. Kondisi kematangan buah yang diterima PKS pada Maret 2016

Hasil survei di perkebunan petani swadaya juga menunjukkan hal yang sama bahwa petani dan pemanen belum mengetahui standar kematangan panen. Hal ini tampak pada buah yang dipanen masih belum memenuhi standar (Gambar 4). Pemanen juga tidak terbiasa untuk mengutip berondolan (Gambar 5) dikarenakan waktu untuk mengutipnya relatif lama yang dapat mempengaruhi tonase buah dan upah yang diperoleh setiap harinya.

Berondolan yang jatuh secara fisiologis merupakan buah yang memiliki kadar minyak tertinggi, apabila tidak terkutip maka rendemen CPO TBS lebih rendah dibandingkan apabila semua berondolan dari satu tandan terkutip. Selain itu, buah yang lewat matang dipanen akan menimbulkan banyak losis karena berondolan terbuang di lapangan, saat penangkutan dan pengolahannya di PKS. Buah yang lewat matang hanya mengandung berondolan yang sedikit dibandingkan janjang kosongnya (Gambar 6). Untuk itu, pengutipan berondolan dari buah luar sangat mempengaruhi rendemen yang akan diperoleh. Sujadi *et al.* (2015) melaporkan bahwa buah luar mengandung kadar minyak paling tinggi dibandingkan buah tengah dan dalam.



Gambar 4. Kondisi buah yang dipanen oleh pemanen di lahan petani swadaya



Gambar 5. Buah matang (kiri), berondolan yang tidak terkutip (tengah) dan berondolan yang dikutip telah membusuk dan menghitam. (kanan)



Gambar 6. Buah lewat matang yang diangkut ke PKS (kiri) mengandung rasio berondolan/tandan rendah (kanan)

KESIMPULAN

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dimiliki oleh petani swadaya cukup kompleks meliputi ekonomi lemah, benih unggul, pengolahan perkebunan atau kultur teknis,

pemanenan dan harga TBS yang rendah. Harga TBS petani swadaya rendah disebabkan oleh varietas yang tidak unggul, kematangan panen yang belum memenuhi standar selain itu, belum ada atau belum kuatnya kemitraan antara petani swadaya dan perusahaan.

SARAN

Tim PIC Regional Jambi mengusulkan pelatihan dan sosialisasi tentang penggunaan benih unggul, kultur teknis dan pemanenan serta pengolahan buah di PKS. Di samping itu, diperlukan kemitraan yang kuat antara petani swadaya dengan perusahaan agar pemasaran buah antar PKS bersaing dengan sehat serta disvarietas harganya rendah. Kemitraan ini yang difasilitasi oleh Dinas Perkebunan Propinsi Jambi nantinya memformulasikan penetapan harga TBS dengan mempertimbangkan fraksi kematangan buah, varietas dan ukuran rerata berat tandan (RBT). Selanjutnya, petani juga harus melakukan perbaikan secara bertahap perkebunan kelapa sawitnya yaitu dengan menggunakan benih unggul dari produsen yang resmi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perkebunan Propinsi Jambi yang memfasilitasi kegiatan ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada APKASINDO dan petani serta perusahaan-perusahaan yang mendukung kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustira, M.A. dan R. Nurkhoiry. 2011. Dampak Kebijakan Bea Keluar terhadap Harga tandan Buah Segar (TBS) di Tingkat Petani. *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit*. 19(2): 91-100.
- Agustira, M.A., R. Amalia, dan T. Wahyono. 2012a. Program Kemitraan Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR) sebagai Alternatif pola Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat. *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit*. 20(2): 79-92.
- Agustira, M.A., R. Amalia, dan T. Wahyono. 2012b. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengelolaan kebun Satu Manajemen pada Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus: Kebun Plasma Tabara PTPN XIII Kalimantan Timur). *Jurnal Penelitian kelapa Sawit*. 20(3): 139-152.
- Amalia, R., M.A. Agustira, dan T. Wahyono. 2015. Tingkat Kepuasan Kemitraan antara PT. Sawindo Kencana Makmur dengan Pekebun Rakyat. *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit*. 23(1): 40-51.
- Dinas Perkebunan Propinsi Jambi. 2015 dan 2016. Data Harga Tandan Buah Segar (TBS) Petani Bermitra. Diputuskan sesuai hasil rapat harga TBS oleh Tim Penetapan harga TBS dan Indeks K. Jambi.
- Hasibuan, H.A. dan E. Nuryanto. 2015. Pedoman Penentuan Potensi Rendemen CPO dan Kernel Buah Sawit di Kebun dan PKS. Buku Seri Populer 16. Penerbit Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Medan.
- International Finance Corporation (IFC). 2013. Diagnostic Study on Indonesia Oil Palm Smallholders. Developing a Better Understanding of Their Performance and Potential. Commissioned by the World Bank Group.
- Kurniawan, A. 2015. Dinamika CPO tahun 2016. PPKS Note. Edisi Desember 2015. www.iopri.org.
- Nasution, Z.P.S., R. Amalia, dan T. Wahyono. 2014. Analisis Efisiensi pemasaran Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (Studi kasus di kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit*. 22(3): 153-163.
- Nasution, Z.P.S., T. Wahyono, dan A.R. Purba. 2015. Tingkat dan Sumber-Sumber Ketimpangan Pendapatan di Antara Rumah Tangga Petani Kelapa Sawit Swadaya di Wilayah Sumatera. *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit*. 2015. 23(2) 91-100.
- Prasteyo, A.E. dan A. Susanto. 2015. Dampak Asap dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terhadap *Elaeobius kamerunicus* pada Kelapa Sawit. PPKS Note. Edisi November 2015. www.iopri.org.
- Rifai, A., S. Hadi, dan N. Qomar. 2008. Studi Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat di Propinsi Riau. *SAGU*. 7(2): 1-6.



- Siregar, H.H. 2015. El Nino 2015 dan Kelapa Sawit di Indonesia. PPKS Note Edisi Oktober 2015. www.iopri.org.
- Sujadi, M. Rivani, H.A. Hasibuan, T. Herawan, dan A.R. Purba. 2015. Kadar minyak pada setiap bagian buah sawit. Poster Presentasi pada Pertemuan Teknis Kelapa Sawit 2015. Yogyakarta 19-21 Mei 2015. ISBN 978-602-7539-24-2.
- Syahza, A. 2004. Distorsi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani di Pedesaan. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*. Universitas Jenderal Soedirman. 4(1): 1-12.
- Wahyono, T., R. Amalia, dan M.A. Agustira. 2013. Efektivitas Implementasi Peraturan Perundangan dalam kebijakan Pemberdayaan Kelompok Tani Pekebun Kelapa Sawit. *Jurnal Penelitian kelapa Sawit*. 21(3): 134-150.